

Barat. Silang sengkabut itulah yang memungkinkan kontestasi identitas-identitas sosial lokal, etnis, religius, dan regional di Tanah Papua sebagai medium resistensi terhadap kehadiran negara.

Para elit lokal memegang peranan penting sebagai mediator atau juga sebagai broker dalam memperjuangkan tuntutan-tuntutan lokal masyarakat. Para elit local di pemerintahan dan di sipil mengakomodasi tuntutan-tuntutan lokal untuk menunjukkan menjadi penguasa di wilayahnya sendiri. Selain mereka pada saat yang sama juga mengincar keuntungan pribadi dengan merebut kekuasaan ekonomi politik untuk kepentingan pribadinya. Sikap ini adalah respon dari para elit lokal di Papua dan juga di sebagian besar daerah di Indonesia karena sentralisasi kekuasaan di elit-elit Jakarta (Timmer, 2007). Para elit local menjadi agen penting dari situasi pemekaran daerah yang mentransformasikan kompleksitas politik local yang melibatkan persaingan identitas-identitas local dan gerakan memperdebatkan identitas budaya ke-Papua-an. Fragmen-fragmen yang dimainkan para elit local untuk menginklusi dan mengeksklusi pada saat yang bersama identitas etniknya di satu sisi dan kehausan kekuasaan ekonomi politik di sisi lain adalah siasat orang Papua kontemporer yang berada di tengah persimpangan jalan dalam mereproduksi identitas budayanya.

Dengan demikian, dalam konteks kontemporer dapat dirumuskan bahwa identitas dan nasionalisme Papua berlapis-lapis dan kompleks dipengaruhi oleh hirarki kebudayaan etnik yang beragam di Papua. Disamping itu, mendebatkan nasionalisme di Bali tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kekuasaan (Belanda dan Indonesia) yang mengkonstruksi jenis nasionalisme yang diinginkan untuk berkembang di Papua. Jika di masa lalu identitas dan nasionalisme Papua bisa disederhanakan dalam logika serial yang terikat yang diturunkan dari sensus (kategorisasi) dan dihitung oleh aparat negara. Mengikuti logika ini identitas nasional seseorang tertentu tergantung pada kategori-kategori yang ditetapkan oleh negara. Pembentukan identitas dan nasionalisme seperti ini disebut sebagai nasionalisme yang terisimentasi, karena diatur oleh angka dan diletakkan dalam sel baris-baris seperti halnya tentara.

Serial pembentukan identitas dan nasionalisme lainnya adalah tidak terikat dan terpecah. Imajinasi nasionalistik seseorang tergantung kepada akumulasi pengetahuan yang dikumpulkannya dari media. Siapa pun dapat mengimajinasikan dirinya hampir sesuka hati menggunakan klasifikasi universal yang ada seperti sebagai revolusioner, nasionalis, aktivis, dan yang lainnya. Oleh karena itu maka banyak varian

nasionalisme yang terbentuk dan diyakini oleh masyarakat. Dalam praktik sehari-hari, orang dipaksa oleh ketegangan hubungan antara kedua konstruksi pembentukan nasionalisme ini untuk mengekspresikan politik identitasnya secara taktis (Anderson, 2004; Scoot, 1998; Laksono, 2011:20-21).

Dalam konteks ketegangan kedua konstruksi pembentukan nasionalisme itulah saya kira kita bisa membaca dan mendudukkan kompleksitas nasionalisme yang berkembang dan bertransformasi di Papua. Orang Papua selalu akan berhadapan dengan ketegangan pada dirinya sendiri ketika harus membayangkan dirinya menjadi orang Papua yang bagaimana dan seperti apa?

Sejarah Sunyi yang Digelapkan

Pembentukan sejarah Papua, seperti layaknya kontestasi (pertarungan) dominasi kekuasaan, yang menyematkan legitimasinya terhadap negeri di ujung timur negeri ini. Namun, dalam pentas pertarungan itulah banyak hal yang bisa terjadi, termasuk di dalamnya adalah "dikalahkan" dan "disingkirkannya" rakyat Papua dari proses pembentukan sejarah tersebut. Studi dan catatan-catatan sejarah yang selama ini sebagian besar mewakili kepentingan "sang kuasa" dalam memandang Papua tanpa sama sekali merekognisi ingatan sosial dan pengalaman rakyat Papua selama rentang proses sejarah tersebut berlangsung. Yang direproduksi ke publik adalah dokumen-dokumen sejarah yang niremansipasi, yang sama sekali menempatkan ingatan sosial masyarakat akar rumput sebagai basis dasar dalam pembentukan sejarah rakyat Papua.

Benny Giay (2000) dalam konteks ini mengungkapkan bahwa dokumen sejarah orang Papua itu bukan hanya catatan-catatan yang dibuat oleh para kolonial yang menjadikan Papua dan rakyatnya sebagai objek jajahan (koloni). Dokumen hidup yang membadan dan menjadi keseharian rakyat Papua justru jauh lebih penting. Dokumen ingatan sosial itulah mengangkat pengalaman dan kejadian masa lampau amat penting untuk merekonstruksi—menyusun kembali—sejarah bangsa Papua menuju Papua Baru. Kerena pengalaman lampau sangat menentukan pemahaman diri orang Papua sekarang, dan masa depannya sebagai suatu bangsa. Sehingga usaha untuk mencari dokumen sejarah mejadi suatu agenda prioritas.

Dokumen sejarah yang dimaksudkan itu tidak berada jauh-jauh. "Barang" itu ada di sekitar dan kehidupan rakyat Papua yang berada di

kampung-kampung. Mereka inilah dokumen sejarah yang terpenting dalam sebuah gerakan penulisan sejarah Papua yang lebih emansipatoris, yang menempatkan rakyat Papua kebanyakan menjadi subyek dan pusran utama pembentukan sejarah. Rakyat Papua yang selama ini suaranya terbungkam oleh kuasa-kuasa yang menyebar secara produktif dan menjelajah jauh hingga di depan kehidupan masyarakat di kampung-kampung.

Salah satu sumber kuasa tersebut adalah “stigmatisasi separatisme” yang mereproduksi beragam jenis kekerasan yang terwariskan hingga kini dalam masyarakat Papua. Stigma ini diciptakan oleh negara dan aparatusnya untuk menjadikan rakyat Papua hanya obyek dan kendaraan politik para elit dan berbagai kepentingan kekuasaan di Jakarta. Hal yang lumrah terjadi bahwa Papua menawarkan berbagai tawaran untuk mengeruk keuntungan eksploitasi sumber daya alam dan berbagai tawaran-tawaran akses ekonomi yang menggiurkan. Yang menjadi dominasi selama ini adalah citra dan reproduksi pengetahuan akan Papua yang eksotis dan memiliki kebudayaan yang khas yang harus dilestarikan. Tak lebih daripada itu. Sementara eksploitasi dan kongsi di antara para elit menghadirkan invasi eksploitatif yang mengeruk kekayaan alam Tanah Papua. Suara rakyat kecil Papua di kampung-kampung terkalahkan oleh narasi-narasi besar ini.

Di tengah rakyat Papua di kampung-kampung itulah “sejarah sunyi” perjalanan bangsa Papua akan berlangsung terus-menerus. Penulisan “sejarah sunyi” rakyat Papua sepatutnya memperhatikan suara-suara rakyat di kampung dengan berbagai kompleksitasnya. Khusus bagi penulisan kembali sejarah orang Papua, *pertama* yang harus diperhatikan adalah dokumen-dokumen historis ada di dalam pengalaman sejarah dan pemahaman diri bangsa Papua yang dipengaruhi oleh rangkaian peristiwa sejarah yang terjadi di tanahnya sendiri. Orang Papua yang telah mengikuti perjalanan sejarah sejak zaman Belanda hingga sekarang di bawah pemerintahan RI adalah sumber dan saksi-saksi sejarah yang dapat dipercaya. Kita tidak perlu mencari dokumen sejarah di mana-mana. Dokumen sejarah dari luar negeri, kita butuhkan tetapi hanya sebatas melengkapi. Bukan sebagai dokumen utama.

Dokumen yang mendasari pelurusan sejarah bangsa Papua menuju Papua Baru itu harus dicari di Papua karena para pelaku dan korban dari sejarah Papua adalah rakyat kecil—bangsa Papua—yang ada di Tanah Papua. *Kedua*, orang Papua ini mempunyai pengalaman sejarah yang tidak pernah ditulis dan tidak pernah mendapat wadah, yang telah membentuk

karakter dan pemahaman diri orang Papua dewasa ini. Pemahaman ini perlu dimiliki oleh orang Papua yang ingin meluruskan sejarahnya. Sehingga dengan sikap dan pandangan ini, kita akan menghindari kesan bahwa orang Papua tidak ada pengalaman sejarah—yang itu tidak mungkin—dan oleh karena itu harus meminta bantuan orang lain atau pihak Barat untuk melegetisasi pengalaman dan pemahaman sejarah (Giay, 2000: 1-2). Sebaliknya orang Papualah yang harus menulis sejarahnya sendiri atau penulisan sejarah dengan menggunakan perspektif yang emansipatoris yang melibatkan rakyat Papua kebanyakan sebagai subyek dari penulisan sejarah tersebut.

Berbagai tragedi kekerasan menyebabkan rakyat Papua mengendapkan ingatan kekerasan dan penderitaan itu membanting dalam kehidupan dan terwariskan kepada keturunannya. Sebagian tragedy kekerasan tersebut diantaranya adalah dimana orang Lani masih menyimpan trauma kolektif terkait dengan Peristiwa Jayawijaya atau yang lebih dikenal sebagai peristiwa tahun 1977 yang sebenarnya dimulai 7 April 1977, ketika pejuang OPM dibawah pimpinan Matias Tabu memasuki daerah Pagai. Mereka menangkap sebuah senjata, 2 karung beras. Karena takut ikut diserang, masyarakat melarikan diri ke hutan. Penyerangan terjadi sekitar jam 3 sore. Kemudian pada 13 April 1977 sekitar jam 2 siang, beberapa anggota TNI AD yang sedang berpatroli diserang di Prime (Distrik Tiom) oleh pejuang OPM yang terdiri dari 200 orang. Para penyerang dibawah pimpinan Boas Wanimbo. Tidak ada korban. Para pejuang memintanya supaya tentara tidak memasuki wilayah Prime sampai selesai Pemilu. Yang bikin masalah kemudian adalah balasan dari pihak ABRI terhadap OPM sebagai pelaku penyerangan. ABRI tanpa pandang bulu menyerang rakyat yang tidak bersalah. Banyak orang biasa, laki-laki dan perempuan, tua muda mengungsi untuk menghindari pembunuhan dan penganiayaan. Ribuan warga yang mati di hutan karena kelaparan dan sakit. Banyak yang menjadi gila. Sebagian dari mereka yang kembali dibunuh setelah disiksa (Giay, 2007).

Kisah-kisah tragedi kemanusiaan tersebut tentu sangat banyak jumlahnya di Tanah Papua. Dari berbagai ingatan sosial tentang tragedi-tragedi tersebutlah sejarah sunyi para rakyat Papua di kampung-kampung terpendam. Rakyat Papua pun kini tengah bergulat dengan sejarah sunyi dan secara terus-menerus menyikapi dan membuat sejarah dan menciptakan budaya baru yaitu budaya damai dan dialog dalam menyikapi masa lalu, sekarang, dan merebut masa depannya.

Sejarah sosial Papua dalam perspektif Indonesia hanya mencatatkan perjuangan orang-orang Papua yang “pro-Indonesia”, yang berjuang melawan penjajahan Belanda 12 tahun lebih lama daripada perjuangan kemerdekaan melawan Belanda di Jawa atau daerah lainnya. Kekuasaan Belanda secara resmi berakhir di Tanah Papua pada 27 Desember 1949. Namun bisa kita buktikan betapa keringnya uraian perjuangan “pahlawan nasional” dari Tanah Papua dalam buku-buku pelajaran sejarah (Aditjondro, 2000). Untuk pahlawan yang “pro-Indonesia” saja sejarah “resmi” Indonesia seakan enggan memberikan ruang, apalagi sejarah terhadap gerakan perlawanan terhadap nasionalisme Indonesia. Tentu ruang tersebut sangat tertutup.

Sejarah rakyat Papua “dihilangkan” melalui beragam cara. Jika rakyat Papua berbicara tentang sejarahnya dianggap separatis, berbahaya dan patut diwaspadai. Pembersihan, penghapusan, dan peminggiran sejarah rakyat Papua dilakukan untuk membangun konstruksi bahwa Bangsa Papua tidak mempunyai sejarah, dan Indonesia lah yang datang sebagai mesianistik yang membawa barang yang bernama “sejarah” bagi Bangsa Papua.

Sejak tahun 1961-1962 (mulainya pemerintahan peralihan PBB-UNTEA) hingga pelaksanaan Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) 14 Juli-2 Agustus 1969, menjadi momen krusial perdebatan status politik terhadap Tanah Papua. Di dalamnya terdapat silang sengkabut dan klaim sejarah yang menyesatkan yang tidak hanya melibatkan Pemerintah Indonesia, namun juga kepentingan internasional. Pasca Pepera 1969 inilah proses Indonesianisasi berlangsung kencang di Tanah Papua. Beragam program pembangunan diintrodusir dengan meminggirkan pengalaman dan nilai-nilai sosial budaya rakyat Papua. Sistem sentralistik dan *top down* menyebabkan Tanah Papua hanya menjadi objek pembangunan, hal yang sama juga terjadi di setiap daerah di Indonesia semasa rezim otoritarian Orde Baru berkuasa. Diskriminasi berlapis juga terjadi karena Papua bukan hanya jauh sejarah geografis, sebagai daerah paling timur di Indonesia, tapi juga “jauh” secara kultural.

Di tengah situasi “sejarah sunyi” yang digelapkan oleh negara dan represi kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan, rakyat Papua mengalami krisis kepercayaan akan identitas dan kebudayaannya. Orang Papua kini mengalami disorientasi sosial lalu mendeklarasikan Papua Tanah Damai. Tujuannya adalah untuk membangun budaya dialog, budaya toleransi, berunding, dan bernegosiasi. Dengan komitmen untuk menghindari tegangan fisik, pendekatan senjata, dan keamanan. Dengan

Papua Tanah Damai orang Papua dan semua unsur masyarakat bisa memiliki ruang untuk menjadi diri sendiri, membuka sejarah sunyi, berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kekerasan dan ketegangan dan belajar menahan diri dan tidak terjebak ke dalam dunia ketegangan yang diciptakan pihak lain (Giay, 2007).

Di tengah situasi krisis dan lumpuhnya spirit perubahan tersebut, diperlukan langkah-langkah untuk membangun spirit bersama menyikapi keterpecahan yang sedang dan akan terus terjadi di tengah rakyat Papua. Oleh sebab itulah diperlukan media-media dan gerakan mediasi (transformasi) kebudayaan dan momentum-momentum dalam berbagai kegiatan-kegiatan untuk membangun persatuan dan rekonsiliasi di antara rakyat Papua. Rakyat Papua kini berada dalam situasi terbagi-bagi dari sisi agama atau gereja, etnis, atau kepentingan sehingga gampang dipecah-pecah berbagai kepentingan untuk melumpuhkan Papua. Langkah awal yang sepatutnya diinisiasi adalah belajar dari gerakan penulisan sejarah-sejarah sunyi yang terlupakan namun hidup menjadi identitas sosial rakyat Papua yang berhubungan dengan pengalaman masa lalunya. Beranjak ke masa depan berarti rakyat Papua harus bisa bernegosiasi dengan (ingatan kekerasan dan penderitaan) masa lalunya untuk kemudian bangkit, memimpin dirinya sendiri, dan membuat gerakan sejarah baru rakyat Papua.

Dalam konteks gerakan sosial di Tanah Papua, saya kira penulisan sejarah dari bawah oleh sebagian besar intelektual Papua, terkait dengan pengalaman dan gugatan terhadap "sejarah resmi" (baca:konstruksi negara) sepantasnya diapresiasi. Sejarah aneksasi dan gugatan integrasi tentu tidak akan didapat dalam Pelajaran Sejarah Nasional Indonesia. Begitu juga sejarah kekerasan dan pelanggaran HAM tidak mungkin akan mendapatkan tempatnya. Yang mungkin akan muncul adalah gambaran "tribal" dan "terkebelakangnya" rakyat Papua dengan ikon koteka yang dianggap lebih rendah dari kebudayaan Indonesia yang katanya adiluhung. Gambaran ini biasanya dilukiskan dalam etnografi suku-suku terasing atau pelajaran suku-suku di universitas dan sekolah-sekolah yang bias, menyesatkan dan juga sangat berperspektif kolonial.

Saya berargumentasi, kinilah saatnya gerakan sejarah *subaltern* Bangsa Papua hadir ke permukaan menjadi suara gugatan. Ekspresi ini juga menjadi medium untuk menegaskan identitas Bangsa Papua di tengah desakan interkoneksi global melalui penetrasi perusahaan multinasional dan tipu muslihat politik lokal yang menghimpit. Di dalamnya gerakan kebudayaan revolusioner bertumpu pada modal dasar

orang Papua dan refleksi kritis budaya asli Papua menuju pada pembebasan dari kemiskinan dan ketertindasan.

Di tengah fragmentasi (keterpecahan) yang hadir di tengah masyarakat Papua karena penetrasi birokrasi/pembangunan, pemekaran daerah, dan investasi global, menafsirkan kelompok-kelompok masyarakat di akar rumput menjadi sangat problematik. Sangat problematik karena di tengah masyarakatpun terdapat lapisan-lapisan (*layers*) masyarakat yang mengaku dirinya “tertindas”. Menafsirkan (bukan mendefinisikan) rakyat inilah yang mengandung politik (penafsiran) tanpa henti yang sangat tergantung dari sudut mana atau perspektif seperti apa “rakyat” tersebut dimaknai.

Rakyat dalam bahasa Laksono (2008 via Budi Susanto, 2005) adalah “orang-orang yang berdaya”, mempunyai kekuatan untuk melakukan perubahan sosial terhadap diri dan lingkungannya. Oleh karenanya rakyat hampir selalu diantara dua sisi yaitu melakukan resistensi (perlawanan) sekaligus obyek penundukan dan eksploitasi. Dalam hal inilah rakyat berbeda dengan “massa” yang sangat mudah untuk dipolitisasi untuk kepentingan kekuasaan. Dalam konteks historis, negara dan kekuasaannya sangat alergi dengan kata “rakyat” karena sejarah panjangnya dalam melakukan gerakan kritis kepada kekuasaan. Dalam bingkai itulah rakyat satu kata yang sangat berpengaruh dalam proses transformasi sosial. Dalam konteks Papua, rakyat juga menjadi subyek (yang berdaya) sekaligus dijadikan sebagai “alat” oleh kekuasaan untuk semakin menancapkan kekuasaannya. Dalam konteks inilah diperlukan sebuah perspektif yang bisa melakukan penafsiran sekaligus pembongkaran (dekonstruktif) terhadap gerakan kerakyatan untuk inisiatif perubahan sosial di Tanah Papua.

Daftar Pustaka

- Broek OFM, Drs. Theo van den. 2002. *Mengatasi Keterpecahan yang Melumpuhkan*, Jayapura: SKP Keuskupan Jayapura dan LSPP Jakarta, 2002.
- Broek, Theo van den. 1998. *Pembangunan, Agama dan Perubahan Masyarakat di Provinsi Irian Jaya dalam Kekayaan, Agama dan Kekuasaan: Identitas Konflik di Indonesia (Timur) Modern*, Yogyakarta, Kanisius.
- Broek OFM, Drs. Theo van den. 1998 “Agenda Rekonsiliasi Irian Jaya” dalam *Suara Pembaharuan*, 17 September 1998.

- Brata, Aloysius Gunadi, 2008, "Pemekaran Daerah di Papua: Kesejahteraan Masyarakat vs Kepentingan Elit", makalah Simposium Nasional Riset dan Kebijakan Ekonomi: "Dampak Bencana Alam dan Lingkungan Terhadap Pengelolaan Ekonomi Indonesia", Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi, Universitas Airlangga, Surabaya, 20-21 Agustus 2008.
- Chauvel, Richard. 2005. *Constructing Papua Nationalism: History, Ethnicity and Adaptation*. Washington: East-West Center
- Chauvel, Richard. 2008. "Rules in Their Own Country?: Special Autonomy and Papuan Aspirations Have been Thwarted by Jakarta and Hampered by the Administrative Fragmentation Sponsored by Local Politicians," dalam *Inside Indonesia*.
- Giy, Benny, 2000. *Menuju Papua Baru: Beberapa Pokok Pikiran sekitar Emansipasi Orang Papua*. Jayapura: Deiyai/Els-ham Papua.
- Giy, Benny. 1996, "Pembangunan Irian Jaya dalam Perspektif Agama, Budaya, dan Antropologi" makalah dalam Simposium Masyarakat dan Pembangunan di daerah Irian Jaya yang dilaksanakan BPC GMKI Jayapura tahun 1996.
- Giy, Benny. 1996a, "Masyarakat Amungme Irian Jaya, Modernisasi dan Agama Resmi: Sebuah Model Pertemuan" *Majalah Deiyai* Januari-Februari 1996.
- Giy, Benny, 1996b. "Masyarakat Amungme (Irian Jaya), Modernisasi dan Agama Resmi: Sebuah Model Pertemuan" dalam *Kisah dari Kampung Halaman*. Yogyakarta: Interfidei.
- Hernawan OFM, J. Budi., 2006, "Membangun Papua Sebagai Tanah Damai: Sumbangan Gagasan untuk Sinode Keuskupan Jayapura", (makalah), Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura.
- Laksono, P.M. 2011. "Ilmu-ilmu Humaniora, Globalisasi, dan Representasi Identitas". Pidato yang disampaikan pada Peringatan Dies Nataliske-65 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 3 Maret 2011.
- Laksono, P.M. 2010b. "Mewacanakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Antropologi". Makalah dalam Kongres Asosiasi Antropologi Indonesia ke-3 dan Seminar Antropologi Terapan di Cisarua 21-23 Juli 2010.
- Laksono, P.M. 2010. "Kontekstualisasi (Pendidikan) Antropologi Indonesia". Makalah dalam Sarasehan AJASI (Asosiasi Jurusan Antropologi Seluruh Indonesia) di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

- Laksono, P.M. 2009. "Peta Jalan Antropologi Indonesia Abad Kedua Puluh Satu: Memahami Invisibilitas (Budaya) di Era Globalisasi Kapital". Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 27 Oktober 2009.
- Lounela, Anu dan R. Yando Zakaria (editor). (2002). *Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung*, Yogyakarta: Insist, Jurnal Antropologi Indonesia dan Karsa.
- Ramstedt, Martin dan Fadjar Ibnu Thufail (editor). (2011). *Kegalauan Identitas: Agama, Etnisitas, dan Kewarganegaraan pada masa Pasca-Orde Baru*, Jakarta: PS DR LIPI, Max Planck Institute for Social Anthropology dan Grasindo.
- Rutherford, Danylin. 2000. "The White Edge of the Margin: Textuality and Authority in Biak, Irian Jaya, Indonesia" dalam *American Ethnologist* Vol. 27, No. 2 (May, 2000), pp. 312-339
- Scott, James C. (1995). *State Simplifications, Some Applications to Southeast Asia*. Amsterdam: CASA.
- Timmer, Jaap, 2007, "Desentralisasi Salah Kaprah dan Politik Elit di Papua", dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (eds.), *Politik Lokal di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 595-625.
- Pamungkas, Cahyo. 2004. "Konflik Elit Lokal dalam Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat", Jurnal *Masyarakat Indonesia* Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indonesia, Jilid XXX. NO. 1. 2004
- Prakarsa Rakyat, 2007. "Situasi Sosial Politik di Wilayah Kepala Burung Provinsi Papua Barat, Inisiatif Perlawanan Lokal Simpul Kepala Burung Papua Januari – Maret 2007".
- Suryawan, I Ngurah. 2013. "Tanah Dibutuhkan Tapi Orang Tidak: Transformasi Masyarakat Adat dalam Perspektif Etnografi dan Sejarah Sosial" dalam *Kritis, Jurnal Studi Pembangunan Interdisipliner* Vol. XXII No. 2 Juli – Desember 2013.
- Suryawan, I Ngurah. 2013b. "Identifying the Dynamics and Complexities of Dewan Adat Papua (Papuan Customary Council): Cultural Identities and Responses" in *Local Civil Societies Dynamics in Indonesia*, PM Laksono, Sukamdi, Lauw Schaupen (editors), CIDIN Radboud University Nijmegen The Netherlands dan UGM Yogyakarta.
- Suryawan, I Ngurah. 2012. "Politik Ruang (Pasar) dan Pemekaran Daerah: Siasat Rakyat Papua di Garis Depan Global" dalam *Kritis, Jurnal Studi Pembangunan Interdisipliner* Vol. XXII No. 1 Februari – Juli 2012.
- Suryawan, I Ngurah. 2012b. *Jiwa yang Patah*, Yogyakarta: Pusbadaya Unipa dan Kepel Press

- Suryawan, I Ngurah. 2011. "Antropologi Gerakan Sosial: Membaca Transformasi Identitas Budaya di Kota Manokwari, Papua Barat" dalam *Humaniora, Jurnal Budaya, Sastra, dan Bahasa* Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Volume 23, Nomor 3, Oktober 2011 (290-300).
- Suryawan, I Ngurah. 2011b. "Komin Tipu Komin: Elit Lokal dalam Dinamika Otonomi Khusus dan Pemekaran Daerah di Papua" dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP)* Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Volume 15, Nomor 2, November 2011 (140-153).
- Tsing, Anna Lowenhaupt, 2005. *Friction: An Ethnography Of Global Connection*, Princeton University Press.
- Widjojo, Muridan. 2001. "Diantara Kebutuhan Demokrasi dan Kemenangan Kekerasan: Konflik Papua Pasca Orde Baru", Paper dalam kerangka "Proyek Penelitian Transisi Demokrasi di Indonesia" yang diselenggarakan oleh LP3ES dan disponsori oleh The Ford Foundation pada tahun 2001.
- Widjojo dkk, Muridan. 2009. *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Past and Securing the Future*. Jakarta: Buku Obor, LIPI dan TIFA.
- Yoman, Socratez Sofyan, 2005. *Orang Papua Bukan Separatis, Makar dan OPM*. Papua Barat: Lembaga Rekonsiliasi Hak-hak Asasi Masyarakat Koteka (Lehamkot) Papua Barat.
- Yoman, Socratez Sofyan, 2010. *Integrasi Belum Selesai: Komentar Kritis atas Papua Road Map*. Jayapura: Cenderawasih Press
- Zollner, Zilfred. 2006. *Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Papua Barat: Studi Realita Sosial dan Perspektif Politis*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan bekerjasama dengan The Evangelical Church in the Rhineland dan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua.

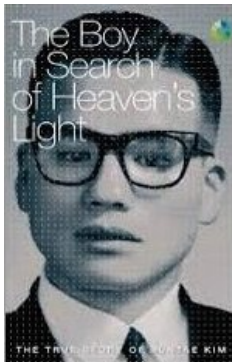
Endnote

1. Beberapa bagian dalam artikel ini adalah Bab IV Bintang Kejora dan Datangnya Kemerdekaan: Siasat dan Gerakan Sosial Orang Papua dari I Ngurah Suryawan, *Jiwa yang Patah* (Yogyakarta: Kepel Press dan Pusbadaya UNIPA Manokwari, 2012). Beberapa bagian lainnya adalah versi awal artikel-artikel yang sebelumnya telah dimuat media lokal Kota Manokwari, Papua Barat.

RESENSI BUKU

Cahaya Surgawi Suntae Kim

Mianto Nugroho Agung



Penulis	: Kim, SunTae
Judul Buku	: The Boy in Search of Heaven's Light; The True Story of Suntae Kim
Penerbit	: World of Life Press
Tahun Terbit	: Cetakan 1, 2012
Tebal	: 169 + XV
ISBN	: 789-89-04-16144-7
Harga	: \$10.00
Cover	: Hard

Suntae memulai harinya sebagaimana hari lainnya. Namun tiba-tiba kedamaian kota Seoul berubah menjadi lautan api ketika terjadi hujan bom dari langit. Mayat-mayat segera bergelimpangan di jalanan. Anak-anak kehilangan orang tuanya. Mereka berteriak-teriak layaknya seorang anak. Suntae, bocah delapan tahun itu, tak dapat memahami mengapa seluruh kengerian itu terjadi di kotanya yang selama ini damai. Bahkan, ketika ia pulang dari ladang bermain dan menikmati mentimun petani baik hati, ia bahkan tak bisa mengerti ketika rumahnya rata dengan tangan dan kedua orang tuanya tak terjejak hingga kini. Perang Korea telah merenggut sebagian kebahagiaan masa kecil Suntae Kim. Tokoh yang kelak buta akibat ledakan bom namun –melalui perjuangan iman yang hebat- sukses menjadi penolong bagi sesama orang buta di Korea Selatan. Syukurlah kenangan masa kecilnya itu masih tertulis rapi di benak Suntae Kim. Sehingga, ia bisa menuliskan dan menerbitkan untuk menjadi pelajaran pada mereka yang mulai menjauh dari Tuhan akibat berbagai penderitaan yang seperti tak bisa ditanggung mereka lagi.

Kenangan masa kecil berupa canda ria dengan sahabat sebaya dalam berbagai aksi, petualangan, dan kehebohan anak-anak di suatu desa yang menjadi *setting* luar biasa langka pastilah merupakan harta karun seseorang yang begitu berharga. Tidak banyak anak-anak zaman kini yang memiliki pengalaman dan romantika semacam itu. Bahkan, bagi anak-

anak yang normal, tanpa cacat fisik, terlebih tanpa penglihatan alias buta.

Suntae Kim memiliki semua pengalaman itu. Kim kecil memilikinya dan kemudian menjadi inspirasi bagi perjalanan dan pelayanan bagi ribuan orang yang tak mungkin memilikinya karena berbagai sebab: keterbatasan lahan, system sekolah formal yang tidak memberi kesempatan anak-anak bermain, obsesi orang tua yang menginginkan anaknya menjadi ranking satu, system tata kota yang tidak ramah bagi anak-anak, dan lain-lain. Itulah sebabnya Suntae Kim memiliki motivasinya: menolong orang buta. Benar, orang buta menolong orang buta.

Pada saat penulis berkunjung ke Yayasan Siloam di Seoul, penulis menyaksikan bagaimana orang-orang buta –dengan berbagai levelnya-bekerja keras, sekeras mereka yang normal. Dalam kesempatan diterima pengurus yayasan ini, diceriterakan riwayat hidup Suntae Kim hingga banyak membantu orang-orang buta di Korea Selatan. Rupanya pengalaman dan ceritera itu dirasa belum cukup sehingga rombongan penulis yang berkunjung ke sana diberi hadiah buku otobiografinya. Cara setiap orang di tempat itu memperlakukan Kim yang –padahal- tidak ada di tempat itu, menunjukkan betapa terhormatnya Suntae Kim ini.

Secara tradisional, orang buta di Korea mendapat stereotip bahkan stigma sebagai orang yang tidak berguna, yang harganya lebih rendah dari sapi atau anjing penjaga. Ekspresi itu bahkan diucapkan sendiri oleh bibi Suntae Kim: *“Blind people are useless in the world. Cows need eyes to work and dogs also need eyes to keep houses safe. But you are blind so you have no need or reason to be allowed to live in this world.”* (18) Bahkan ketika bibinya itu mengetahui betapa Suntae-Kim harus melewati episode dramatis dan berbahaya untuk sampai ke Yunjae City di seberang Seoul, fakta bahwa kedua orang tua Suntae Kim telah meninggal dan tak mewariskan sedikitpun harta, dan fakta bahwa Suntae Kim masih kanak-kanak. Orang buta bagi masyarakat Korea Selatan pada waktu itu tetap dianggap tak berharga lagi.

Apa boleh buat, Suntae Kim kecil sudah tak diterima oleh keluarga besarnya sendiri. Maka ia kemudian –dengan dimotivasi oleh tulisan Helen Keller di dalam dadanya (153) pergi dan membangun masa depannya sendiri. Singkat ceritera, Suntae Kim berhasil mengatasi segala rintangan hidupnya (setelah terpukul menjadi pengemis, 51) sebagai anak 10 tahun yang buta. Ia berhasil menyelesaikan sekolah dan kemudian menjadi mahasiswa Teologi di perguruan tinggi yang baik (Soongsil University, 87), menjadi pendeta (131) dan kemudian juga menjadi dosen

di almamaternya bahkan di beberapa perguruan tinggi di negaranya. Perjuangan hidup itu bukan untuk dinikmatinya sendiri, ia memelopori berdirinya pusat pelayanan dan rehabilitasi bagi penyandang cacat mata. Ia berbuat sebisanya untuk menghilangkan stereotipe dan bahkan stigma bagi sesama penyandang cacat mata. Dan, semua itu tidak datang tiba-tiba.

Suntae Kim memulai *passion*-nya kepada orang yang kurang beruntung dengan berkaca pada dirinya sendiri, kenyataan bahwa Tuhan senantiasa menolongnya, dan dari pihak-pihak yang memiliki hati mulia dan berkenan membantunya kesulitan hidupnya. Ia memiliki pengalaman hidup yang lengkap dan berharga. Sampai Suntai menjadi orang buta pertama di Korea Selatan yang lulus SMA umum (normal) pada 1952 dan 1966 mencapai BA dalam Filsafat di Soongsil University. Pada tahun 1969 ia menyelesaikan Masternya. Kemudian gelar doktornya diselesaikan pada 1993. Kesempatan menolong orang-orang buta Korea terjadi ketika ia ditunjuk oleh PCK (Presbyterian Church of Korea) menjadi direktur badan pelayanan yang baru, yaitu *Blind Evangelical Missions*. Meski tak dapat dipungkiri ada masa-masa lain yang berharga, seperti: pertemuannya dengan Siloam Mother's Association dari Misi Presbiterian untuk orang buta, pertemuannya dengan Pendeta Kyung-Chik Han, dll. Saat memulai, ia hanya punya satu orang staf. Tanpa menunda-nunda lagi, Suntae Kim segera menyusun program untuk menolong orang buta di Korea itu. Program-program itu meliputi: Pelayanan bagi orang Kristen yang buta, Kunjungan dari gereja ke gereja, Publikasi Himne dan Alkitab Braille, Beasiswa bagi orang buta. Ia juga berkesempatan mengunjungi Jepang dan Amerika Serikat untuk studi banding program-program pelayanan bagi orang buta ini.

Pencariannya akan terang surgawi itu belum tuntas. Ia masih mempunyai mimpi-mimpi. Maka pada 1986, ia memulai membangun Siloam Eye Hospital, tahun 1996 ia memulai Klinik Berjalan bagi orang buta, dan puncaknya, pada 1997, ia memulai pelayanan dalam berbagai hal dan berskala lebih luas dan menorehkan prestasi luar biasa: operasi dan penyembuhan mata bagi lebih dari 20 ribu orang buta dan rehabilitasi bagi ratusan orang buta di Siloam Eye Hospital.

Dalam penjelasan pengurus Yayasan Siloam kepada penulis, atas perjuangan Suntae Kim itu, pemerintah Korea Selatan memberikan bantuan dan penghargaan. Bahkan, kini (2014) saat penulis mengunjungi Yayasan Siloam itu, perlakuan pemerintah, gereja, dan lembaga-lembaga lain telah berubah. Kini berbagai fasilitas bagi orang buta di Korea telah sangat baik. Lebih dari itu, stigma dan stereotip bagi orang buta telah

lenyap tak bersisa. Karena, orang-orang buta di Korea telah berhasil menunjukkan dirinya setara dengan orang normal. Inilah monument terbesar perjuangan Suntae Kim. Maka, beralasan sekali jika ia menjadi salah seorang penerima Penghargaan Ramon Magsaysay.

Pelajaran berharga dari buku biografis Suntae Kim ini adalah 1) pemimpin besar selalu merupakan pribadi yang ditempa lama sekali dengan berbagai pengalaman kehidupan baik susah maupun senang, 2) pemimpin bisa menjadi besar jika ia merupakan pribadi yang visioner, konsisten, konsekwen, dan giat menghidup-hidupi keberpihakannya, 3) di tengah-tengah kebengisan zaman dan tumpulnya nurani manusia sehingga menjadi jahat kepada sesamanya, tentu masih ada kebaikan itu, 4) pemimpin besar yang berhasil adalah pribadi yang secara cerdas mampu mengombinasikan pengalaman hidupnya, realitas orang lain, dan campur tangan Tuhan melalui kerja keras nan tak kenal lelah, dan 5) pemimpin besar harus dilahirkan sedemikian rupa dalam ibu-bapak nonbiologis yang memungkinkan sesuatu pribadi menjadi terkuak kapasitas kepemimpinannya. Satu hal lagi, melihat kontinuitas dan sustainabilitas gerakan memberdayakan orang buta Korea yang kini bahkan semakin besar, maka, hikmah dari kehidupan Suntae Kim bagi generasi kini dan mendatang adalah kokohnya system dan manajemen suksesi yang dibangun. Sehingga, gerakan ini tidak mandek dan bahkan mati sepeninggal Suntae Kim, pendirinya itu. (**Mianto Nugroho Agung**, staf Yayasan Bina Darma. Email: mnagung@gmail.com)

Penulis Nomor ini

Floeranado Kilanta Sembiring, berasal dari Medan, Sumatra Utara. Sedang menyelesaikan studi di Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana. Turut mendirikan Gerakan Janda Dua Peser Untuk Kemanusiaan dan pernah terlibat dalam Lembaga Kemahasiswaan UKSW. Kini ia aktif menulis diberbagai media.

Gusti A. B. Menoh, berasal dari Rote, Nusa Tenggara Timur. Ia menyelesaikan studi Sarjana di Fakultas Teologi UKSW Salatiga. Gelar Magister Humaniora ia peroleh dari Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara dengan tesis yang berjudul "Agama dalam Ruang Publik: Hubungan antara Agama dan Negara dalam Masyarakat Postsekuler menurut Jurgen Habermas". Ia meminati filsafat politik, masalah demokrasi, HAM, masalah-masalah kebangsaan-kenegaraan. Saat ini membantu mengajar Filsafat di lingkungan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

Ingurah Suryawan, merupakan Dosen Tetap di Universitas Negeri Papua Manokwari Papua Barat. Menyelesaikan studi di Jurusan Antropologi Fakultas Sastra Universitas Udayana, 2006. Menekuni studi politik kebudayaan dan kekerasan di Bali. Menyelesaikan tesisnya di Program Pascasarjana (S2) Kajian Budaya Universitas Udayana dengan judul, Bara Suara di Tepi Kuasa (Pergolakan Kelompok Subaltern Bali Pascakolonial). Menempuh program doktor di Universitas Gajah Mada Jogjakarta. Menulis buku, Ladang Hitam di Pulau Dewa (Pembantaian Massal di Bali 1965) dan Kesaksian Air Mata (Kisah-kisah Memecah Senyap), 2007. Bali, Narasi dalam Kuasa (Politik dan Kekerasan di Bali), Jejak-jejak Manusia Merah (Siasat Politik Kebudayaan Bali), 2005.

Joshua Maliogha Ndoen, berasal dari Waingapu, NTT. Sedang menyelesaikan studi di Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana. Pernah terlibat dalam Lembaga Kemahasiswaan UKSW, sebagai Ketua Senat Mahasiswa Universitas dan kini aktif menulis di berbagai media.

Pdt. Irene Ludji adalah salah satu pengajar tetap di Fakultas Teologi, Universitas Kristen Satya Wacana. Ia mengampu mata kuliah Etika Kristen, Etika Sosial, dan Ekumenisme. Irene ditabiskan sebagai pendeta di Gereja Masehi Injili di Timor pada tahun 2009. Ia lulus dari *Louisville Presbyterian*

Theological Seminary dengan gelar Master of Arts in Religion. Irene meminati diskusi disekitar tema etika dan teologi sistematika dalam konteks Indonesia yang plural.

Richard Mayopu, anggota dewan redaksi Pax Humana, alumnus FISKOM UKSW. Dosen FTI UKSW.

Victor Silaen, kelahiran Jakarta, 1 Oktober 1964, Doktor Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Ketua DPP Forum Penulis dan Wartawan Indonesia (FPWI – Forum PWI) ini seorang pengajar, peneliti, dan penulis. (Sumber: <http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/286-direktori/4209-dosen-politik-yang-penulis> Copyright © tokohindonesia.com)

Yesaya Sandang adalah alumnus FH-UKSW (S1) dan program pasca sarjana Dept. Filsafat FIB-UI (S2). Sejak 2014 bergabung dengan program studi Destinasi Pariwisata FTI-UKSW. Minat riset pada bidang kebijakan dan regulasi pariwisata, HAM dan pariwisata, pariwisata dan perdamaian, serta etika pariwisata. Aktif menulis diberbagai media seputar isu, sosial, budaya dan kemasyarakatan. Dapat dihubungi melalui yesaya.sandang@staff.uksw.edu